

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian lain yang sudah ada yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan peneliti dalam menulis karya ilmiah skripsi. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini adalah untuk menunjukkan perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dinatanaya Candra Kinanti. 2022. *“Implementasi Program Kampung Siaga Bencana di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi program kampung siaga bencana di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Penelitian ini melihat aspek-aspek yang berhubungan dengan KSB yakni karakteristik masyarakat desa rawan bencana, cara memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, mengorganisasikan masyarakat agar terlatih siaga bencana, dan persiapan sistem peringatan dini lokal.

Metode dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 5 orang berdasarkan teknik *purposive*. Informan dari penelitian ini adalah pengurus dan anggota KSB, perangkat desa Wlahar, tokoh masyarakat desa Wlahar, dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang membentuk KSB di Desa Wlahar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa KSB Desa Wlahar telah

melaksanakan program dan kegiatan di bidang kebencanaan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut antara lain yakni analisis penilaian risiko bencana yang terdiri dari penilaian ancaman, kerentanan, dan kapasitas Desa Wlahar bersama dengan BPBD Kecamatan Kroya, pemasangan rambu-rambu evakuasi, pemetaan wilayah rawan bencana, dan penyaluran bantuan logistik dan sandang lumbung sosial kepada masyarakat korban terdampak bencana.

2. Bambang Kuncoro Aji. *“Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Surotrunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.

Penelitian Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Surotrunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan program KUBE di Desa Surotrunan. Efektivitas program terdiri dari 4 aspek yaitu aspek pencapaian tujuan program, aspek ketepatan sasaran program, aspek sosialisasi program, dan aspek pemantauan program. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian yaitu kelompok KUBE di Desa Surotrunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yang menggunakan seluruh dari jumlah populasi yaitu berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan studi dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu secara umum terkait efektivitas program memperoleh skor aktual sebesar 3358 atau 69,95

% dari skor ideal sebesar 4800 dan secara umum skor tersebut masuk dalam kategori efektif. Walaupun demikian, terdapat permasalahan yang muncul yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok untuk mendukung pelaksanaan program serta kurang terjalinnya hubungan yang solid dengan pendamping. Maka dari itu peneliti mengusulkan program “SAKURA (Sinergitas KUBE Wujudkan Masyarakat Sejahtera)” untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada.

3. Lisda Dzulhijjah, Deden Sumpena, Ali Azis. 2020. *“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”*. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama serta hasil dari pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Subjek penelitian adalah pengelola, anggota, dan keluarga anggota kelompok usaha bersama. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran logika dengan cara mereduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan yang dihubungkan dengan konteks pengembangan masyarakat. Hasil analisis penelitian menunjukkan penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang dilakukan kelompok usaha bersama berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan tercapainya perekonomian

masyarakat yang meningkat, kegiatan sosial lebih aktif, dan masyarakat lebih kreatif dan mandiri.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinatanaya Candra Kinanti	Implementasi Program Kampung Siaga Bencana di Desa Wlahar Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap (2022)	Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa KSB Desa Wlahar telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang kebencanaan.	Persamaan ditemukan pada variabel yang digunakan yaitu implementasi program. Kemudian metode penelitian yang digunakan juga sama dengan menggunakan deskriptif kualitatif.	Pada fokus program yang diteliti dan lokasi penelitian. Perbedaan juga terlihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2.	Bambang Kuncoro Aji	Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Surotrunan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Kemudian hasilnya yaitu secara umum terkait efektifitas program memperoleh skor aktual sebesar 3358 atau 69,95 % dari skor ideal sebesar 4800 dan secara umum skor tersebut masuk dalam kategori efektif.	Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu memiliki kesamaan jenis program yang diteliti.	Perbedaan ditemukan pada variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.
3.	Lisda Dzulhijjah, Deden Sumpena, Ali Azis	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha	menunjukkan penguatan, perlingungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang dilakukan	Ditemukan kesamaan pada fokus program yang diteliti yaitu Program Krlompok	Aspek penelitian yang digunakan untuk landasan menentukan tujuan penelitian

		Bersama (KUBE)	kelompok usaha bersama berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan tercapainya perekonomian masyarakat yang meningkat, kegiatan sosial lebih aktif, dan masyarakat lebih kreatif dan mandiri.	Usaha Bersama dan metode penelitian yang digunakan juga sama dengan menggunakan deskriptif kualitatif.	berbeda, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama serta hasil dari pemberdayaan ekonomi
--	--	----------------	--	--	---

Sumber: Hasil Analisa Peneliti 2023

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang telah peneliti uraikan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan seperti yang sudah tercantum dalam tabel 2.1 di atas. Peneliti melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program KUBE Queensland di Desa Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Persamaan dari ketiga penelitian tersebut yaitu metode penelitian yang digunakan dan variabel implementasi yang ingin diteliti.

Kebaruan dan kekhasan dari penelitian ini merupakan sasaran atau objek penelitian itu sendiri yaitu Program KUBE Queensland di Desa Seliling Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Kemudian pada rumusan masalah dan tujuan juga ada perbedaan karena peneliti menggunakan aspek dengan teori berbeda dari para peneliti sebelumnya. Meskipun ada persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan, namun dengan adanya unsur-unsur yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya hasil penelitian yang berbeda.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Tinjauan tentang Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan dalam Abdul Majid (2013) bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Kemudian, Joko dalam Faturrohman (2012) mengartikan Implementasi sebagai suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2019) membagi definisi implementasi menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengartikan bahwa implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan.
2. Solichin Abdul Wahab memandang implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai implementasi di atas bisa kita simpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu program atau kebijakan tertentu.

2.2.1.2 Unsur-unsur Implementasi

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur Pelaksana
2. Adanya program yang dilakukan, serta
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

2.2.1.3 Model Implementasi

Tachan (2006) menjelaskan tentang model implementasi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:
 - a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.

- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.
2. Edwards III (1980) merumuskan empat faktor yang merupakan syarat-syarat penting guna mengkaji dan meneliti berhasil tidaknya implementasi kebijakan, yaitu *communication, resources, disposition*, dan *bureaucatic structure*.
3. Van Meter dan Horn (1975) menyatakan bahwa model proses implementasi kebijakan yang menggambarkan beberapa faktor yang membentuk mata rantai antara kebijakan terdiri dari (1) Standar dan saasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik organisasi pelaksana; (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (5) Sikap para pelaksana; serta (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
4. Menurut Smith (1973), dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan 37 Proses Implementasi Kebijakan Publik timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi–institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.
5. Model Implementasi Charles O. Jones dalam Arifin Tahir, (2014) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program dengan memperlihatkan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas yang dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- b. Implementasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengaruh yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

2.2.2. Tinjauan tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.2.2.1 Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.. Program KUBE berjalan dengan melibatkan pendamping sosial KUBE yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan program KUBE agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya. Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin

dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial

2.2.2.2 Pembentukan KUBE

1. KUBE dibentuk dengan kriteria
 - a. Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/ nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha
2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
3. Pengurus KUBE terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
4. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta dapat dibantu oleh pendamping sosial KUBE.
5. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpendil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
6. Anggota KUBE harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2.2.2.3 Hak dan Kewajiban Anggota KUBE

1. Anggota KUBE mempunyai hak:
 - a. Memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. Mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. Mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. Menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. Ikut merumuskan aturan kelompok.
2. Anggota KUBE berkewajiban:
 - a. Mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. Memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
 - d. Aktif dalam proses usaha KUBE;
 - e. Membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. Menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

2.2.2.4 Ketentuan Pendamping Sosial KUBE

1. Pendamping sosial KUBE berasal dari:
 - a. Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE oleh unit kerja eselon II yang menangani KUBE.
 - b. Tenaga jesejahteraan sosial kecamatan;

- c. Pekerja sosial masyarakat;
 - d. Pengurus karang taruna;
 - e. Pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - f. Tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
2. Tugas Pendamping Sosial KUBE
- a. Membentuk KUBE;
 - b. Mewakili calon penerima bantuan;
 - c. Menyiapkan calon penerima bantuan;
 - d. Menyiapkan rencana anggaran biaya;
 - e. Memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
 - f. Memberikan bimbingan motivasi sosial;
 - g. Mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
 - h. Memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - i. Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

2.2.3. Tinjauan tentang Pemberdayaan

2.2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merujuk pada bagaimana seseorang atau kelompok khususnya mereka yang rentan, lemah dan mempunyai permasalahan untuk dapat memiliki kekuatan atau kemampuan. Kekuatan atau kemampuan yang dimaksud adalah bagaimana orang atau kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka

butuhkan, serta partisipasi mereka dalam pembangunan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2017).

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain lain.

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu siklus seperti yang dijelaskan oleh Wilson dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) yaitu proses menumbuhkan keinginan, mengembangkan kemauan, peningkatan peran, peningkatan efektifitas, dan peningkatan kompetensi. Siklus pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi lokal atau masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga keberhasilan suatu pemberdayaan juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan atau kapasitas dari masyarakat atau penerima manfaat dalam pemberdayaan tersebut. Swift dan Levin dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk :

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Pemberdayaan menurut Pranarka dan Vidhyandika dalam Hikmat (2013) merupakan upaya untuk menjasikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin efektif dan efisien secara structural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional maupun internasional termasuk dalam bidang politik, ekonomi maupun lainnya.

Menurut Ife (1995) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dalam pengertian ini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, namun kekuasaan atau penguasaan seseorang atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, seperti kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, pekerjaan, dan tempat tinggal.
2. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan untuk menentukan kebutuhan sesuai dengan aspirasi dan keinginannya sendiri.
3. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan untuk mengutarakan atau mengekspresikan ide atau gagasannya secara bebas dan tanpa adanya tekanan.
4. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan untuk menjangkau, menggunakan dan memberikan pengaruh dalam pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

5. Sumber-sumber, yaitu kemampuan untuk memobilisasi atau mengelola sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, serta pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses menciptakan keturunan, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan, lemah dan mengalami masalah. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh upaya-upaya atau proses perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan peran dan tugas-tugas kehidupannya.

2.2.3.2 Prinsip Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebianto (2019) menjelaskan terdapat 3 prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Mengerjakan, dalam pelaksanaan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk mengerjakan dan menerapkan sesuatu. Dengan berpartisipasi dalam pengerjaan tersebut, masyarakat akan

mengalami proses belajar yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama.

2. Akibat, kegiatan pemberdayaan wajib memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat. Akibat dapat mempengaruhi semangat masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
3. Asosiasi, dimana setiap kegiatan pemberdayaan harus berkaitan dengan kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatan dengan kegiatan atau peristiwa lainnya.

Maryani dan Roselin (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip yang terdapat dalam pemberdayaan, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan, merupakan kesejajaran kedudukan antar masyarakat dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemberdayaan. Setiap individu harus saling mengakui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Dengan begitu akan terjadi proses saling belajar, menghormati, membantu, dan saling tukar pikiran dan pengalaman.
2. Prinsip partisipasi, merujuk pada proses pendampingan yang harus dilaksanakan secara maksimal untuk dapat memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat dan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Proses pendampingan yang baik akan meningkatkan motivasi masyarakat dan akan berpengaruh pada peningkatan kompetensi masyarakat.

3. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, yaitu mengedepankan kemampuan masyarakat dan memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki kemampuan. Melalui kemampuan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengembangan dan terciptalah kemandirian di masyarakat.
4. Prinsip berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan dirancang agar dapat dilakukan terus menerus. Secara bertahap program pemberdayaan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat. Dan pada akhirnya mereka akan dapat menggali dan mengembangkan potensi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.

Sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan serta dilakukan pula pendampingan baik dan pemberian kesempatan bagi masyarakat. Penciptaan kemandirian juga menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan secara paksa kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan juga perlu memperhatikan elemen-elemen penting agar pemberdayaan yang dilakukan terhindar dari hambatan-hambatan. Elemen-elemen ini harus diperhatikan oleh pelaksana atau perancang program pemberdayaan.

2.2.3.3 Jenis Bidang Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebianto (2019) pemberdayaan dapat dilaksanakan pada lima bidang, yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Pemberdayaan merupakan proses penyadaran tentang keberadaannya, masalah-masalah yang dihadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah, peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri-sendiri dan masyarakatnya. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan.

2. Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar (terutama bagi kelompok miskin) yang mudah, cepat, dan murah dengan memanfaatkan pengobatan “modern” dan atau pengobatan tradisional yang teruji kemanjuran dan keamanannya. Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan mencakup upaya-upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

3. Bidang Bisnis

Pemberdayaan diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi maupun sistem. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain lain.

4. Bidang Sosial-Politik

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

5. Bidang Lingkungan

Pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumberdaya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah tepat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah perusahaan atau perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

2.2.4. Tinjauan tentang Kemiskinan

2.2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara bahasa dapat diartikan sebagai ketiadaan, ketidakmampuan, atau keterbatasan. Dalam KBBI sendiri kemiskinan diartikan sebagai situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan menjadi suatu permasalahan sosial klasik yang telah hadir sejak lama. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan sampai saat ini masih belum dapat dihilangkan atau ditiadakan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019

sebanyak 24,79 juta jiwa. Menurun 0,36 juta orang pada Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang pada September 2018.

Kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit); (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial); (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa; (e) pengetahuan dan keterampilan; dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup menurut Friedman dalam Edi Suharto (2017).

Menurut beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kesulitan dalam mengakses berbagai hal dalam kehidupan yang diakibatkan oleh ketiadaan modal dan sumber untuk mengaksesnya. Modal tidak hanya bersifat materi, akan tetapi juga dapat bersifat pengetahuan dan keterampilan.

2.2.4.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan terdiri dari beberapa jenis seperti:

1. Kemiskinan absolut

Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah.

3. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural lebih menuju keadaan orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, dimana tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.

4. Kemiskinan Situasional

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan penduduk yang terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun dan membuat mereka menjadi miskin (Mardimin, 1996)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan itu sendiri terdiri dari lima jenis, yaitu kemiskinan absolut, relatif, struktural, situasional, dan kultural. Hal ini sangat berkaitan dengan penyebab dari kemiskinan itu sendiri. Misalnya saja kemiskinan kultural yang disebabkan oleh kultur atau budaya yang membuat masyarakat menjadi miskin. Dalam hal ini masalah kemiskinan akan menjadi fokus penanganan bagi pekerja sosial dengan kemiskinan.

2.2.4.3 Penyebab Kemiskinan

Suatu hal tidak terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab, begitupun masalah sosial seperti kemiskinan yang memiliki berbagai penyebab. Berikut

diantaranya beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang penyebab dari kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5. Adanya perbedaan Sumber Daya Manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi.
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
8. Tidak adanya pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Wigjosoebroto dalam Suyanto (2005) mengatakan bahwa akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut:

Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin secara alami memang ada, dan bukan bahwa ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang

lain. Mungkin saja dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieleminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional seperti pola hubungannya *patron client*, jiwa gotong royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Kedua, kemiskinan buatan yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan buatan dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus menerus sakit. Berbeda dengan prespektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras. Kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan sosial acap kali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural.

Dari beberapa penyebab di atas, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, modal, budaya, struktur pemerintahan, dan kebijakan. Penyebab tersebut tidak hanya menjadi sebuah penyebab yang berdiri sendiri, tetapi juga saling berkaitan dan dapat menjadi beberapa penyebab kemiskinan pada individu, dan/atau keluarga.

2.2.5. Tinjauan Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW) dalam Huda, Miftachul (2003), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Pekerjaan sosial dikenal sebagai profesi pertolongan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya. Siporin dalam Dwi Heru Sukoco (2011) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai “Metode yang bersifat sosial dan institusional untuk membantu seseorang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi sosial mereka”.

2.2.4.2 Tujuan Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, atau kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Max Siporin (dalam Dwi Heru Sukoco (2011) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat system pekerjaan sosial, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Memadainya standar-standar sunstensi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.

3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi secara optimal dengan status dan peranan mereka di dalam institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat.

Penjelasan mengenai keempat fungsi diatas menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki peran yang sentral untuk meningkatkan keberfungsian sosial serta taraf hidup yang layak baik secara individu maupun kolektif.

2.2.4.3 Peran Pekerja Sosial di Bidang Kemiskinan

Fokus utama dari profesi pekerjaan sosial adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial memandang kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami akibat ketidakmampuan dalam melakukan tugas-tugas pokoknya atau mengalami disfungsi sosial, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut Rustanto (2013), pekerjaan sosial secara konseptual memandang kemiskinan sebagai suatu persoalan yang multidimensional, yang mencakup permasalahan ekonomi dan sosial, baik itu bersifat individual maupun struktural.

Sedangkan Menurut Spergel dan Zastrow dalam Isbandi (2008) peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan komunitas atau masyarakat dalam hal ini khususnya masalah kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

1. Pempercepat perubahan (*enabler*)

Pekerja sosial membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan membantu masyarakat agar dapat

mengartikulasikan kebutuhan mereka. Selanjutnya pekerja sosial mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif.

2. Perantara (*broker*)

Pekerja sosial menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*) tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. peran ini dilakukan dengan melibatkan klien dalam kegiatan perhubungan supaya pada saat nanti dilakukannya terminasi klien mampu untuk menjalin hubungan dengan lembaga terkait.

3. Pendidik (*educator*)

Pekerja sosial harus mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan agar memperoleh informasi yang memadai untuk disampaikan kepada masyarakat. Terkait dengan peran ini maka pekerja sosial harus selalu mau belajar dan mengikuti perkembangan komunitas/masyarakat ataupun trend masalah.

4. Tenaga ahli (*expert*)

Pekerja sosial memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Usulan dan saran tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh

klien (masyarakat atau organisasi) tetapi merupakan masukan gagasan sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya yang menjadi klien dari tenaga ahli adalah HSO, GO dan NGO yang sangat berkaitan dengan peran perencana sosial.

5. Perencana sosial (*social planner*)

Perencana sosial sebagai proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan sekaligus mencegah timbulnya kembali masalah sosial tertentu yang ada di masyarakat. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas (task goal). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged groups) atau kelompok rawan sosial-ekonomi. Praktikan berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai konsumen atau penerima pelayanan (beneficiaries).

6. Advokat (*advocate*)

Pekerja sosial melakukan advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau layanan tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan atau layanan tidak memperdulikan. Terkait dengan peran ini, seorang pekerja sosial seringkali harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

7. Aktivis (*activist*)

Peran ini mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Pekerja sosial harus memperhatikan isu-isu tertentu seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, kesenjangan dan perampasan hak. Seorang aktivis biasanya mencoba merangsang kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada melalui taktik konflik, konfrontasi (demonstrasi) dan negosiasi.